



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE

SIARAN PERS

Untuk segera diberitakan

Penguatan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran melalui Pengadopsian ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Fishers

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 9 Mei 2023 – Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menilai inisiatif Pemerintah Indonesia untuk mendorong proses adopsi *Declaration on the Protection of Migrant Fishers* di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur merupakan langkah awal yang baik untuk usaha pelindungan awak kapal perikanan/AKP migran (*migrant fishers*). Pemerintah Indonesia perlu terus memanfaatkan Keketuaan (*Chairmanship*) ASEAN 2023 untuk memastikan pengadopsian Deklarasi oleh Negara Anggota ASEAN beserta dokumen implementasinya.

Pengadopsian *ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Fishers* menjadi sangat penting dikarenakan banyaknya AKP migran yang berasal dari dan/atau bekerja di wilayah ASEAN dan di kapal negara-negara bendera lain di luar ASEAN, mengalami eksploitasi, perbudakan modern, bahkan hingga menjadi korban perdagangan manusia (IOM Indonesia, KKP, and Coventry University, 2016; Scalabrini Migration Center, 2020; ILO, 2020).

Sesuai dengan komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang dalam pembahasan KTT ASEAN 2023 yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2023, upaya pelindungan AKP migran perlu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu kawasan asal terbesar dari AKP migran di seluruh dunia, ASEAN belum memiliki data akurat mengenai jumlah AKP migran mengingat banyaknya penempatan non-prosedural di sektor ini. ILO (2022) mencatat sekitar 125.000 AKP yang bekerja di kapal-kapal Jepang, Republik Korea, Thailand, dan Taiwan berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Maka, ASEAN memiliki nilai tawar tinggi untuk memastikan pelindungan yang lebih baik terhadap AKP migran pada industri perikanan tangkap global.

Setelah diadopsi, *Declaration on the Protection of Migrant Fishers* akan menjadi **instrumen ASEAN pertama** yang mengatur mengenai pelindungan AKP migran. Selama ini, AKP migran belum dibahas secara khusus dalam forum-forum ASEAN yang ada. Belum terdapat mekanisme kerjasama antara Negara Anggota ASEAN dalam menangani kasus eksploitasi dan perdagangan manusia yang dialami oleh AKP Migran asal ASEAN. Instrumen ASEAN yang saat ini berlaku, seperti *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* dan *ASEAN Declaration of Human Rights*, masih berorientasi kepada pekerja *land-based* dan belum menjawab kerentanan AKP Migran. Meskipun tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), Deklarasi ini akan mendorong masuknya agenda pelindungan AKP migran dalam kebijakan dan mekanisme kerjasama ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN terkait migrasi dan hak asasi manusia.

Deklarasi ini merupakan langkah awal bagi ASEAN untuk meningkatkan kerjasama antara Negara Anggota ASEAN tentang pelindungan AKP migran asal ASEAN. Kerjasama yang perlu diprioritaskan adalah terkait (i) pengawasan dan penegakan hukum, (ii) pertukaran

informasi terkait kasus-kasus AKP migran, termasuk kasus perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan aspek privasi, (iii) penetapan standar kerja yang layak (*decent work*) di kapal ikan dan kesehatan dan keselamatan kerja di kapal ikan, (iv) akses terhadap keadilan, termasuk pemulihan hak bagi AKP migran, (v) repatriasi dan reintegrasi AKP migran, serta (vi) sertifikasi dan pengakuan atas kemampuan (*skills*) AKP migran.

Dalam *Multi-Stakeholders Consultation Workshop on the Development of the ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers on Board Fishing Vessels* pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Bali, kelompok masyarakat sipil, termasuk IOJI, menyampaikan masukan tertulis kepada para pemimpin Senior Labor Officials Meeting (SLOM) terkait ketentuan perlindungan AKP migran yang harus dimasukkan dalam Deklarasi ini. Masukan-masukan tersebut disesuaikan dengan kerentanan AKP migran asal ASEAN, seperti rekrutmen yang berlapis dan tidak terpantau, isolasi di tengah laut tanpa akses, proses transit yang tidak terdata, impunitas korporasi yang melakukan pelanggaran HAM dan perburuan terhadap AKP migran, jeratan hutang, serta rendahnya akses terhadap keadilan.

Beberapa masukan yang disampaikan adalah terkait (i) penegasan atas persamaan hak asasi manusia dan perburuan antara AKP migran dan pekerja migran lain; (ii) peningkatan perlindungan AKP migran di seluruh tahapan migrasi, termasuk tahapan rekrutmen dan penempatan, jaminan sosial, serta penetapan standar *decent work* di kapal ikan, (iii) pengakuan terhadap hak AKP migran atas komunikasi dan hak atas pertolongan darurat (*immediate emergency response*), (iv) bantuan dan akses terhadap keadilan, (v) penegasan komitmen untuk mengidentifikasi, menangani, dan menghukum segala tindakan kekerasan dan eksploitasi, termasuk perdagangan manusia terhadap AKP migran, serta (vi) penegasan terhadap perlunya akuntabilitas dari peran dan tanggung jawab negara bendera, negara pelabuhan, negara pantai, dan negara transit dalam perlindungan AKP migran. Keenam aspek di atas dapat meningkatkan perlindungan bagi AKP migran asal ASEAN.

Berdasarkan hal-hal di atas, IOJI kembali mendorong Pemerintah Indonesia untuk memastikan pengadopsian ASEAN *Declaration on the Protection of Migrant Fishers*, yang mencakup aspek-aspek perlindungan yang direkomendasikan dalam kegiatan *Multi-Stakeholder Consultation Workshop* pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Bali. Pemerintah Indonesia juga perlu untuk mengembangkan *Guidelines* untuk menindaklanjuti Deklarasi ini. Muatan dari *Guidelines* tersebut seharusnya menerjemahkan norma dan prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi AKP migran yang tercantum dalam Deklarasi dan hukum internasional menjadi rencana aksi dan program-program teknis yang konkrit bagi ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN.***

Narahubung: Jeremia Humolong Prasetya, IOJI Program Manager for Access to Justice, +6281380802531 atau info@oceanjusticeinitiative.org

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) adalah lembaga think-tank dan advokasi kebijakan yang mendukung Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, untuk mewujudkan tata kelola kelautan dengan berlandaskan prinsip perlindungan yang efektif, pemanfaatan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan yang berkeadilan. IOJI membangun kolaborasi dengan aktor negara dan non negara untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional dan internasional dengan menyediakan berbagai usulan kebijakan berbasis bukti ilmiah. IOJI juga melakukan kerja pendampingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut, seperti nelayan kecil, masyarakat pesisir dan pekerja migran pelaut perikanan, dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

Catatan untuk Editor:

- Sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 tanggal 10 Mei 2023, Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) menyelenggarakan pertemuan ke-29 pada 8 Mei 2023 di Bali, Indonesia. Pertemuan ini memberikan dukungan penuh kepada Ketetuaan Indonesia di ASEAN dengan tema “*ASEAN Matters: Epicentrum of Growth*”, yang berfokus pada tiga prioritas yaitu (i) Permasalahan ASEAN; (ii) Pusat Pertumbuhan; dan (iii) Implementasi Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Pertemuan yang berada di bawah Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN ini sangat strategis karena menyepakati berbagai hal, termasuk penguatan arsitektur kesehatan regional; memberdayakan desa untuk memungkinkan mereka mempercepat pembangunan pedesaan di wilayah tersebut; mempromosikan kerja sama lingkungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memitigasi dampak perubahan iklim; **melindungi pekerja migran ASEAN secara lebih baik dan meningkatkan kapasitas pekerja untuk menjamin Masa Depan Pekerjaan**; serta penguatan pembangunan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.
- Badan Sektoral ASCC telah memperkuat perlindungan bagi masyarakat ASEAN dan sekarang diharapkan para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis, termasuk juga Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam KTT ASEAN ini kita menantikan perkembangan yang sedang berlangsung dalam proses penyusunan Pedoman ASEAN tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarga dalam Situasi Krisis; Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran; Pedoman ASEAN tentang Portabilitas Manfaat Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran; dan Dokumen Panduan ASEAN untuk Melaksanakan Deklarasi ASEAN tentang Memajukan Daya Saing, Ketahanan dan Kelincahan Pekerja demi Masa Depan Pekerjaan.